



► Risalah Kebijakan

Juni 2020

COVID-19 dan dunia kerja: Memastikan keterlibatan penyandang disabilitas di semua tahapan respons

Penyandang disabilitas, 15 persen dari populasi dunia,¹ menghadapi marjinalisasi dalam hal sosial, ekonomi dan kesehatan serta keterbatasan layanan publik dalam menjangkau mereka. Marjinalisasi ini meningkatkan ancaman terhadap kehidupan dan mata pencarian yang ditimbulkan oleh krisis COVID-19. Menanggapi krisis ini, pendekatan yang inklusif bagi para penyandang disabilitas sangat penting demi mengurangi dampak negatif krisis dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.

Laporan singkat ini menyoroti masalah-masalah utama yang harus ditangani oleh respons inklusif COVID-19, sebagaimana diserukan oleh Sekretaris Jenderal PBB.² Respons harus didasarkan pada pendekatan ILO untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua dan memastikan pekerjaan serta perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas. Ini akan berkontribusi pada masing-masing pilar utama ILO untuk memerangi COVID-19 di dunia kerja.³

► Memastikan karantina dan tindakan pembatasan lainnya responsif terhadap situasi para penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kondisi kesehatan yang dapat meningkatkan risiko terkena COVID-19.⁴ Secara umum, penyandang disabilitas kurang dapat memastikan penjagaan jarak fisik, menghadapi hambatan aksesibilitas dalam memperoleh informasi yang relevan dan mungkin merasakan memburuknya isolasi sosial yang ada dan peningkatan paparan terhadap kekerasan dan pelecehan. Keterwakilan yang berlebihan para penyandang disabilitas di antara kaum miskin dan perekonomian sektor informal semakin meningkatkan risiko infeksi mereka. Banyak dari risiko ini semakin parah dirasakan oleh perempuan dan lansia penyandang disabilitas.⁵

Pada saat yang sama, beberapa menyatakan bahwa langkah-langkah pencegahan COVID-19 mungkin akan menciptakan hambatan baru bagi para penyandang disabilitas. Semua risiko ini harus ditangani dengan cara-cara yang melindungi penyandang disabilitas dari penularan, dan pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk mempertahankan pekerjaan dan pendapatan mereka. Di Uganda, survei di antara 10.000 penyandang disabilitas dan anggota keluarganya pada akhir April 2020 menunjukkan bahwa 45 persen penyandang disabilitas merasa khawatir tentang bagaimana mereka akan memberi makan keluarga dibandingkan dengan 14 persen yang merasa khawatir bahwa mereka mungkin terinfeksi oleh COVID-19.⁶

1 WHO dan Bank Dunia (2011) laporan dunia tentang disabilitas

2 Sekretaris Jenderal PBB (2020) Ikhtisar Kebijakan: Tanggapan Disabilitas-Inklusif terhadap COVID-19

3 Merangsang ekonomi dan pekerjaan; perusahaan pendukung, pekerjaan dan pendapatan; melindungi pekerja di tempat kerja; mengandalkan dialog sosial untuk solusi: ILO (2020) Ikhtisar Kebijakan: Kerangka kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari krisis COVID-19

4 WHO (2020) Pertimbangan disabilitas selama wabah COVID-19

5 Sekretaris Jenderal PBB (2020) Policy Brief: Dampak COVID-19 pada orang yang lebih tua dan Respons Disabilitas-Inklusif terhadap COVID-19

6 Cahaya untuk Dunia, TRAC FM (2020) Dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas di Uganda

Memastikan perlindungan dari COVID-19 melalui tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) inklusif-disabilitas. Pengusaha harus memastikan penyediaan informasi untuk pekerja tentang risiko kesehatan COVID-19 dengan cara yang dapat diakses. Beberapa faktor risiko dapat dikurangi melalui penyesuaian yang relevan di lokasi perusahaan ataupun melalui kerja jarak jauh atau cuti berbayar, ketika bekerja di lokasi perusahaan yang terlalu berisiko. Menurut survei yang dilakukan oleh Jaringan Bisnis dan Disabilitas Global ILO (GBDN) pada Mei 2020,⁷ praktik perusahaan yang paling sering dilakukan untuk mencegah infeksi COVID-19 di antara para pekerja dengan disabilitas adalah melalui kerja jarak jauh, jam kerja yang fleksibel dan cuti berbayar. Solusi ini harus dibahas kasus per kasus, karena tidak semua pekerja dengan disabilitas menghadapi risiko yang sama. Banyak perusahaan yang menanggapi survei GBDN ILO, menyebutkan bahwa mereka memberikan **dukungan kesehatan mental** kepada pekerja mereka. Banyak penyandang disabilitas juga menghadapi masalah kesehatan mental karena krisis COVID-19 mempengaruhi mereka dengan cara yang berbeda.⁸

Diperlukan langkah-langkah dukungan yang berhubungan dengan kesehatan mental yang dapat diakses oleh pekerja penyandang disabilitas, dan diberikannya perhatian khusus pada penyandang disabilitas psikososial, sembari menghindari stigma dan diskriminasi. Pusat Pelatihan Khusus & Disabilitas Federasi Pengusaha Ceylon (Sri Lanka) telah menyoroti perlunya langkah-langkah memastikan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan layanan bantuan korban bagi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan.

Organisasi kerja dan tatanan kerja harus dapat diakses dan inklusif. Ketika merancang dan menerapkan tatanan kerja alternatif atau meninjau tatanan kerja di tempat kerja, lingkungan yang dapat diakses dan penyesuaian yang masuk akal berdasarkan kebutuhan individu harus dipastikan. Dalam hal kerja jarak jauh sangat penting konten digital dapat diakses, dan, jika perlu, bahasa isyarat dan format pertemuan yang dapat diakses disediakan. Beberapa pekerja dengan disabilitas akan memerlukan akses untuk perangkat lunak adaptif atau peralatan yang mereka miliki di tempat kerja, atau penyesuaian lebih lanjut di lingkungan kerja baru mereka. Organisasi

pengusaha dapat membimbing anggotanya tentang cara mendukung pekerja dengan disabilitas melalui pengaturan kerja yang relevan.⁹ Pusat Pelatihan Khusus & Disabilitas Federasi Pengusaha Ceylon (Sri Lanka) mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk memastikan akomodasi yang wajar bagi penyandang disabilitas yang bekerja di kantor dan dari rumah.¹⁰ Kongres Serikat Buruh Inggris (TUC) meluncurkan panduan tentang penyesuaian yang mungkin dilakukan pada bulan April 2020 untuk menangani masalah-masalah sebagai akibat kerja jarak jauh di antara pekerja dengan disabilitas.¹¹

Penyandang disabilitas perlu melanjutkan pengembangan profesional mereka dalam masa krisis. Jaringan Bisnis dan Disabilitas Bangladesh memfasilitasi layanan penyesuaian pekerjaan selama krisis bagi para penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan pertama, dan Jaringan Bisnis dan Disabilitas Filipina meluncurkan inisiatif pelatihan ulang untuk membantu pekerja penyandang disabilitas memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk pekerjaan pascakrisis.¹² Serikat pekerja Kanada telah berkoordinasi dengan Jaringan Perempuan dengan Disabilitas Kanada (DAWN) yang telah mengembangkan serangkaian studi kasus tentang para pengusaha panutan dari berbagai sektor, di mana praktik-praktik yang baik dapat dibagikan dengan usaha lain.

Mereka terfokus pada meminta pertanggungjawaban pengusaha agar dapat terus merekrut, mempertahankan dan mempromosikan penyandang disabilitas dalam bisnis mereka, termasuk dana untuk mendukung usaha kecil dan menengah agar tidak mengalami kesulitan yang tidak semestinya dalam mengakomodasi penyandang disabilitas.¹³

Situasi para penyandang disabilitas yang bekerja sendiri atau dalam **sektor informal** sangat sulit. Para pekerja ini perlu mendapatkan dukungan agar dapat mempertahankan mata pencarian dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Serikat pekerja telah menyoroti situasi rentan pekerja penyandang disabilitas di sektor informal, khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi penyebaran virus corona.

7 ILO (2020) Inklusi disabilitas dalam respons perusahaan terhadap COVID-19: hasil survei antara Jaringan Bisnis dan Disabilitas Nasional dan anggotanya. Pada bulan Mei 2020, Jaringan Bisnis dan Disabilitas Global ILO melakukan dua survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan praktik yang baik dalam tanggapan COVID-19: yang satu menargetkan anggota perusahaan dari Jaringan Bisnis dan Disabilitas Nasional (NBDN), sementara yang satunya lagi menargetkan NBDN sendiri. Sebanyak 157 anggota perusahaan dari 21 NBDN telah memberikan jawaban, begitu juga dengan 17 NBDN.

8 Sekretaris Jenderal PBB (2020) Policy Brief: COVID-19 dan Perlunya Tindakan terhadap Kesehatan Mental

9 ILO (2020) Panduan pengusaha tentang bekerja dari rumah sebagai respons terhadap merebaknya COVID-19

10 ILO (2020) Inklusi disabilitas dalam respons perusahaan terhadap COVID-19: hasil survei antara Bisnis Nasional dan Jaringan Disabilitas dan anggotanya

11 Kongres Serikat Buruh (2020) COVID-19 dan penyesuaian yang wajar - panduan untuk perwakilan pekerja

12 ILO (2020) Inklusi disabilitas dalam respons perusahaan terhadap COVID-19: hasil survei antara Bisnis Nasional dan Jaringan Disabilitas dan anggota mereka

13 DAWN (2020) Pesan dari DAWN tentang COVID-19

Langkah-langkah perlindungan sosial yang ditargetkan.¹⁴ Pandemi saat ini telah menunjukkan peran penting perlindungan sosial dalam mengatasi dampak krisis COVID-19. Negara-negara dengan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan inklusif berada dalam posisi yang lebih baik dalam memberikan dukungan mendesak kepada para penyandang disabilitas. Hingga Mei 2020, setidaknya 60 negara telah mengambil tindakan khusus untuk mereka:¹⁵

- Bantuan langsung tunai (BLT). Banyak negara telah menyediakan lebih dari satu BLT atau peningkatan bantuan langsung tunai bagi penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan tunjangan disabilitas. Beberapa, termasuk Prancis, Republik Kirgizstan dan Arab Saudi telah melonggarkan persyaratan administrasi untuk memastikan akses berkelanjutan ke tunjangan disabilitas. Rwanda dan Sri Lanka telah memperluas cakupan sehingga dapat memasukan lebih banyak penyandang disabilitas. Beberapa negara telah mengadopsi cuti berbayar bagi orang tua atau anggota keluarga penyandang disabilitas untuk mempertahankan nafkah.
- Dukungan dalam bentuk non-tunai. Banyak negara telah menyediakan makanan atau barang bukan makanan serta layanan dukungan berbasis rumah. Yordania, Maroko, dan beberapa negara bagian di India telah membuat saluran telepon bantuan bagi para penyandang disabilitas.
- Adaptasi dari penyampaian mekanisme untuk mencegah risiko kontaminasi dan mengatasi pembatasan karantina. Contohnya ada yang menetapkan tanggal tertentu untuk mengambil bantuan sehingga dapat menghindari kerumunan di Afrika Selatan, pengiriman bantuan tunai langsung ke rumah di Albania dan Armenia, atau pendaftaran daring dan akses jarak jauh untuk sertifikat penyandang disabilitas di Rusia.

Serikat Pekerja Uruguay, *Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores* (PIT-CNT) memberikan informasi kepada pekerja dengan disabilitas mengenai akses ke tunjangan, bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas yang relevan, berkontribusi pada promosi dialog daring mengenai permasalahan ini di antara serikat pekerja di Amerika Latin.

Mempertahankan dan mengembangkan layanan dukungan bagi para penyandang disabilitas selama karantina dan krisis kesehatan. Penyesuaian dalam penyediaan perawatan dan bantuan sangat penting bagi para penyandang disabilitas. Saat perempuan harus memikul sebagian besar tanggung jawab perawatan,¹⁶ penyesuaian yang dilakukan harus responsif gender untuk memenuhi kebutuhan perempuan sebagai penerima dan penyedia perawatan dan untuk mendukung redistribusi perawatan. Perawatan, bantuan, layanan terkait disabilitas (termasuk penyediaan alat bantu), perlu dilanjutkan sepanjang karantina dan tindakan pembatasan lainnya. Ini mensyaratkan bahwa layanan ini dianggap sebagai sesuatu yang mendasar. Pendanaan harus dipastikan untuk penyedia layanan yang memberikan dukungan dan bantuan penting kepada para penyandang disabilitas dari segala usia.

Sistem dukungan sebaya untuk para penyandang disabilitas sangat diperlukan demi mengatasi risiko peningkatan isolasi. Para penyandang disabilitas dapat berkontribusi pada skema dukungan sebaya yang terkait pekerjaan dengan membagikan strategi ketahanan mereka dan memimpin percakapan tentang kerja jarak jauh bagi mereka yang beralih ke bentuk pekerjaan ini selama karantina. Platform dapat dikembangkan untuk membantu mencocokkan orang-orang yang berisiko dan mereka yang dapat memberikan bantuan.¹⁷

Organisasi pekerja dan anggotanya juga memainkan peran kunci dalam mempromosikan inklusi disabilitas dengan membantu pekerja dengan disabilitas memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka, membuat pusat-pusat pekerja yang dapat diakses oleh mereka dan membangun aliansi dengan organisasi-organisasi disabilitas.¹⁸

14 ILO, UNICEF, Kemitraan PBB untuk Hak-Hak Penyandang disabilitas, Aliansi Disabilitas Internasional, Pelapor Khusus untuk Hak-Hak Para Penyandang disabilitas (2020) Brief: Respons Perlindungan Sosial inklusif-disabilitas terhadap krisis COVID-19

15 Pusat untuk Kebijakan inklusif (2020) Tinjauan awal langkah-langkah perlindungan sosial khusus untuk penyandang disabilitas dan keluarga mereka dalam menanggapi krisis COVID-19

16 ILO (2019) Lompatan kuantum untuk kesetaraan gender bagi pekerjaan masa depan yang lebih baik untuk semua

17 Kerjasama Global tentang Teknologi Alat Bantu (GATE)

18 ILO (2017) Aksi Serikat Pekerja atas Pekerjaan Layak untuk Penyandang disabilitas: Tinjauan Global

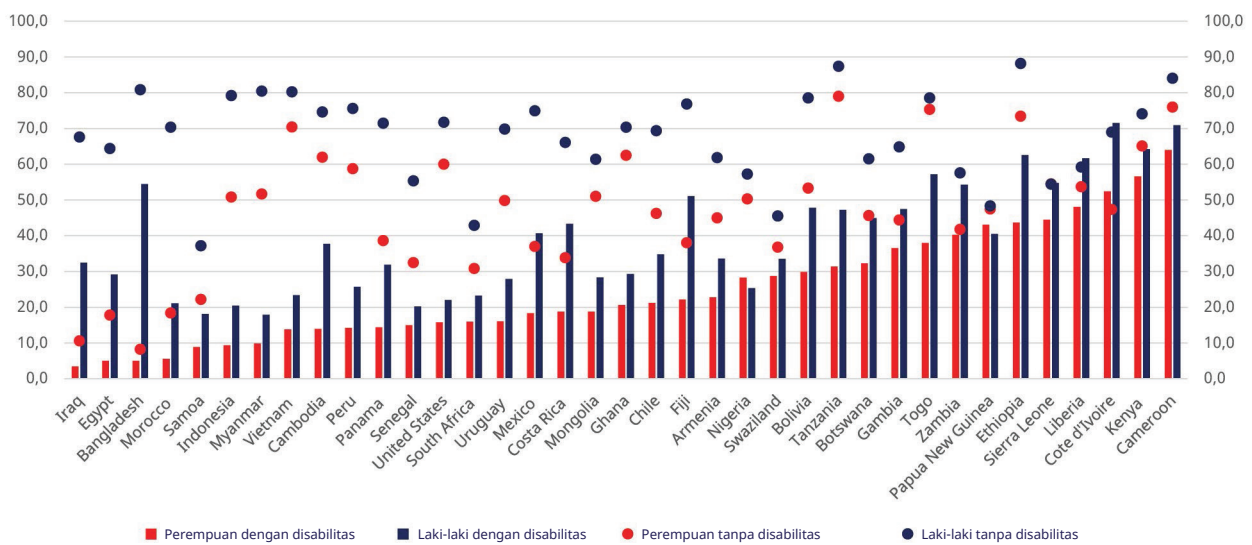
► Dimasukkannya penyandang disabilitas dalam respons sosial-ekonomi

Banyak penyandang disabilitas yang memasuki krisis ini dengan telah menghadapi pengucilan besar di semua bidang dunia kerja. Penyandang disabilitas memiliki:

- Kemungkinan kecil untuk mendapatkan pekerjaan atau memiliki kondisi kerja baru dibandingkan orang non-disabilitas.¹⁹

- Lebih mungkin berada di sektor informal dibandingkan orang non-disabilitas.²⁰
- Tidak dijangkau secara memadai oleh perlindungan sosial. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, kurang dari 20 persen orang dengan disabilitas parah yang memiliki akses ke skema perlindungan sosial terkait disabilitas.²¹

Gambar 1: Rasio pekerjaan terhadap populasi berdasarkan status disabilitas dan jenis kelamin, data terbaru ILO.



Pengucilan ini bahkan lebih jelas terjadi pada penyandang disabilitas intelektual dan psikososial,

dan juga bagi penyandang disabilitas ganda. Berbagai diskriminasi lebih lanjut memperburuk marginalisasi penyandang disabilitas perempuan dalam pekerjaan dan terkait dengan cakupan perlindungan sosial.

Gejolak pandemi dan ekonomi yang diakibatkannya telah meningkatkan kerentanan para penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dan pengucilan lebih lanjut. Mereka berada di antara yang paling terpuak oleh krisis ekonomi,²² dan lebih mungkin kehilangan

pekerjaan dan memiliki kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Inklusi disabilitas merupakan hal sentral untuk respons sosial-ekonomi COVID-19 dan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.²³

Perspektif dan pengalaman hidup para penyandang disabilitas dapat membantu menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi krisis dan memastikan masyarakat yang lebih adil buat semua. Mekanisme untuk mempromosikan inklusi disabilitas berkontribusi pada respons yang dapat melayani semua orang dengan lebih baik, membuat sistem lebih gesit dan responsif terhadap situasi yang kompleks.

19 UN DESA (2018) Laporan Disabilitas dan Pembangunan: Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh, untuk dan dengan para penyandang disabilitas

20 Ibid.

21 ILO (2019) Mengukur kesenjangan pembiayaan dalam perlindungan sosial untuk mencapai target SDG 1.3: Estimasi global dan strategi untuk pembangunan negara

22 Mitra, S. dan Kruse, D., 2016. Apakah pekerja dengan disabilitas lebih cenderung untuk digantikan? Jurnal Internasional Manajemen Sumber Daya Manusia, 27 (14), hlm.1550-1579

23 Pembelajaran untuk respons COVID-19 dan pemulihan dapat diambil dari inklusi disabilitas dalam krisis kemanusiaan, lihat misalnya: International Disability Alliance (IDA), Kemanusiaan & Inklusi (HI), CBM (2019) *Penyertaan penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan* : 39 contoh praktik lapangan, dan pembelajaran dari 20 negara, untuk semua fase respons kemanusiaan.

Sekretaris Jenderal PBB telah meminta tanggapan inklusif-disabilitas untuk COVID-19.²⁴ Sebuah kelompok kerja terikat waktu telah dibentuk oleh Kantor Eksekutif Sekretaris Jenderal PBB dalam rangka mempromosikan keterlibatan orang-orang penyandang disabilitas di bidang kesehatan, sosial-ekonomi dan tanggapan kemanusiaan serta untuk memastikan inklusi disabilitas diperhitungkan dalam pendanaan yang dialokasikan untuk menanggapi COVID-19. ILO meluncurkan seruan aksi untuk mengingatkan semua pemangku kepentingan agar menyertakan penyandang disabilitas dalam semua inisiatif terkait respons COVID-19.²⁵

Langkah pertama dalam merancang respons sosial-ekonomi adalah **melakukan penilaian cepat** terhadap situasi. Penting untuk penilaian ini mempertimbangkan situasi khusus para penyandang disabilitas, dan memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai.²⁶ Selanjutnya, penting untuk memastikan partisipasi para penyandang disabilitas dan organisasi perwakilan mereka.

Ketika merancang inisiatif yang akan digunakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari krisis, inklusi disabilitas perlu dilakukan **melalui kombinasi langkah-langkah pengarusutamaan dan tersasar**.

Pendekatan jalur kembar ini perlu secara eksplisit diperkirakan dalam pendanaan yang dialokasikan terhadap respons. Dana global dan regional, serta pendanaan dari donor pembangunan, harus menunjukkan kepemimpinan dengan memberikan contoh. Penanda disabilitas yang belum lama dibuat oleh Komite Bantuan Pembangunan OECD (DAC)²⁷ dapat digunakan untuk menilai inklusi disabilitas proyek dan program, dan donor harus berkomitmen untuk menggunakan penanda ini dalam konteks alokasi sumber daya COVID-19 mereka.

Inklusi disabilitas sebagai persyaratan untuk pendanaan akan membuat donor dan penerima bertanggung jawab dan memastikan pelaporan yang transparan. Data terpilah disabilitas dan berdasarkan jenis kelamin, serta pelaporan yang secara eksplisit menyediakan informasi tentang bagaimana mengarusutamakan disabilitas dalam inisiatif, bagaimana inisiatif tersebut memberi manfaat bagi penyandang disabilitas dan langkah-langkah tersasar mana yang telah dilakukan, harus dipertimbangkan dalam konteks ini.

Banyak negara mempromosikan **inisiatif untuk mendukung retensi pekerjaan dan promosi**

pekerjaan dalam respon sosial-ekonomi dengan mendukung perusahaan, khususnya UKM, dan pekerja yang telah kehilangan pekerjaan. Inisiatif-inisiatif ini, termasuk pengembangan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, layanan pengembangan bisnis, layanan ketenagakerjaan, pekerjaan umum, program infrastruktur padat karya atau bentuk-bentuk lain dari aktivasi pasar tenaga kerja, harus mempromosikan keterlibatan penyandang disabilitas. Mereka dapat melakukannya dengan memperhitungkan aksesibilitas layanan, melakukan penjangkauan yang ditargetkan dan, jika memungkinkan, menetapkan target atau kuota untuk pekerjaan para penyandang disabilitas. Hal yang sama berlaku untuk inisiatif yang menargetkan ekonomi pedesaan, sektor informal dan sektor-sektor yang memiliki peluang pertumbuhan, serta inisiatif yang mempromosikan lapangan kerja bagi kaum muda.

Dukungan keuangan bagi pengusaha di mana pengusaha diberikan insentif dengan syarat inklusif-disabilitas. Persyaratan dalam pengadaan publik adalah mekanisme yang berguna untuk mempromosikan pekerjaan para penyandang disabilitas, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Dalam hal dukungan pemerintah, perusahaan yang menanggapi survei GBDN ILO menyatakan bahwa subsidi untuk menutup biaya terkait penyesuaian tempat kerja yang wajar dan subsidi upah adalah prioritas untuk respons bisnis inklusif-disabilitas.²⁸

Dana harus dialokasikan untuk organisasi disabilitas untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan guna membuat inisiatif dan layanan inklusi-disabilitas yang relevan. Perhatian khusus harus diberikan pada pencocokan pekerjaan yang ditargetkan dan, jika diperlukan, untuk mendukung pekerjaan, serta pilihan pemagangan bagi penyandang disabilitas muda.²⁹

Pengusaha memiliki peran kunci dalam inklusi disabilitas di pasar tenaga kerja. Banyak kemajuan telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir untuk mempromosikan inklusi disabilitas, termasuk di negara-negara berkembang. **Jaringan Bisnis dan Disabilitas Nasional**³⁰ telah memainkan peran kunci dalam hal ini dan juga dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa para penyandang disabilitas menjadi bagian dari respons sosial ekonomi terhadap krisis. Jaringan Bisnis dan Disabilitas Nasional dapat menyediakan panduan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam merancang dan menerapkan respons sosial-ekonomi yang inklusif-disabilitas.

24 Sekretaris Jenderal PBB (2020) Policy Brief: Respons Disabilitas-Inklusif terhadap COVID-19

25 ILO (2020) Tidak ada seorangpun yang tertinggal, tidak sekarang, tidak akan pernah ada: Orang dengan disabilitas dalam respons COVID-19

26 Alat utama untuk melakukan ini dalam survei dan sensus adalah Kumpulan Pertanyaan Singkat Grup Washington

27 OECD (2019) Buku Pegangan untuk penanda inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas

28 ILO (2020) Inklusi disabilitas dalam respons perusahaan terhadap COVID-19: hasil survei antara Bisnis Nasional dan Jaringan Disabilitas dan anggotanya

29 ILO (2018) Policy Brief: Membuat pengajaran magang dan di tempat kerja termasuk bagi penyandang disabilitas

30 Lihat misalnya Jaringan Bisnis dan Disabilitas Global ILO dan Jaringan Bisnis dan Disabilitas Nasional yang terhubung dengannya

Di Uganda, sebuah **pernyataan bersama oleh mitra sosial**, Federasi Pengusaha Uganda dan Organisasi Nasional Serikat Buruh, menyerukan tanggapan komprehensif terhadap langkah-langkah COVID-19 untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal, terutama orang yang hidup dengan HIV, penyandang disabilitas, migran dan orang-orang dalam situasi rentan lainnya.³¹

Jangkauan dan kecukupan perlindungan sosial perlu ditingkatkan. Di luar langkah-langkah langsung yang diidentifikasi di bagian sebelumnya, penting untuk secara signifikan meningkatkan jangkauan perlindungan sosial dan jumlah dukungan sebagai langkah-langkah utama dalam respons sosial-ekonomi langsung. Dalam hal tunjangan disabilitas, ini harus terfokus pada biaya tambahan terkait disabilitas dan karenanya harus sesuai dengan penerimaan pendapatan dari pekerjaan.

► Memanfaatkan kesempatan untuk lebih inklusif dan “normal yang lebih baik”

Respons langsung terhadap krisis, jika inklusif-disabilitas, akan membentuk peluang baru dan lebih baik bagi para penyandang disabilitas di masa depan. Jika visibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam respons sosial-ekonomi dapat dipastikan, ini akan menjadi dasar bagi peran mereka dalam pemulihan. Secara global, inklusi disabilitas perlu sepenuhnya menyatu dalam upaya kerja sama internasional yang akan mendukung pemulihan dari krisis.

Lima rekomendasi menyeluruh dari laporan **“Menjadikan Pekerjaan Masa Depan inklusif bagi para penyandang disabilitas”**³² saat ini bahkan lebih relevan untuk masa depan dan keluar dari krisis:

- Mengembangkan pekerjaan dan hubungan kerja baru yang mengintegrasikan inklusi disabilitas
- Mengembangkan keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang inklusif bagi penyandang disabilitas
- Merancang pembangunan universal yang terintegrasi dari semua infrastruktur, produk dan layanan baru
- Mengembangkan teknologi alat bantu, yang sudah ada maupun yang baru dikembangkan, terjangkau dan tersedia
- Menyusun langkah-langkah untuk menyertakan penyandang disabilitas dalam area perekonomian yang sedang tumbuh dan berkembang

Menuju transisi yang adil dan inklusif-disabilitas. Respons terhadap COVID-19 harus berkontribusi pada upaya memastikan transisi yang adil menuju ekonomi

dan masyarakat yang berkelanjutan secara lingkungan. Promosi transisi yang adil dan penciptaan pekerjaan ramah lingkungan harus inklusif bagi penyandang disabilitas.³³ Semakin inklusi disabilitas, akan semakin besar pula ini dapat mempengaruhi upaya yang lebih luas untuk pemulihan dalam dunia kerja.

Membangun sistem perlindungan sosial yang universal dan inklusif. Krisis ini telah menunjukkan relevansi sistem perlindungan sosial yang memadai sebagai kunci untuk melindungi semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Sangat penting untuk memastikan landasan perlindungan sosial dan cakupan universal manfaat disabilitas. Sistem perlindungan sosial yang inklusif harus menjamin jaminan pendapatan, cakupan biaya terkait disabilitas dan akses ke layanan kesehatan dan layanan pendukung di sepanjang siklus kehidupan.³⁴

Penyampaian harus melalui skema arus utama dan disabilitas khusus, dan pembiayaan berkelanjutan dipastikan melalui perpaduan skema pembiayaan-pajak dan kontribusi.

Perlindungan sosial terkait disabilitas harus sesuai dengan pekerjaan dan program pemberdayaan ekonomi.³⁵ Tunjangan disabilitas telah memiliki hubungan yang kompleks dengan pekerjaan. Beberapa didasarkan pada anggapan “ketidakmampuan untuk bekerja”. Pendekatan ini memperkuat prasangka, menciptakan insentif negatif untuk pencarian kerja dan tidak memperhitungkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan pekerja dengan disabilitas karena disabilitas mereka. Maka penting tindakan-tindakan perlindungan sosial yang digunakan untuk menangani krisis ini dalam jangka menengah dan panjang tidak mereproduksi kembali dinamika ini.

31 Federasi Pengusaha Uganda, Organisasi Nasional Serikat Buruh (2020) *komunike Bersama FUE/NOTU tentang tanggapan COVID-19 di dunia kerja di Uganda*

32 ILO, Fundación ONCE (2019) *Menjadikan Pekerjaan Masa Depan inklusif bagi penyandang disabilitas*

33 ILO (2019) *Policy Brief: Penyandang disabilitas dalam transisi yang adil menuju ekonomi rendah karbon*

34 ILO et al. (2019) *Pernyataan bersama: Menuju sistem perlindungan sosial inklusif yang mendukung partisipasi penuh dan efektif para penyandang disabilitas*

35 ILO, UNICEF, Kemitraan PBB tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas, Aliansi Disabilitas Internasional, Pelapor Khusus tentang Hak-hak Penyandang disabilitas (2020) *Brief: Respons Perlindungan Sosial inklusif-disabilitas terhadap krisis COVID-19*

Tunjangan disabilitas harus dirancang untuk memungkinkan akses ke pekerjaan, sembari memberikan pengakuan bahwa bagi banyak penyandang disabilitas, hambatan dan kurangnya dukungan akan menghambat masuknya mereka ke pasar tenaga kerja.³⁶

Memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk layanan dukungan disabilitas dan organisasi disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan serangkaian intervensi khusus untuk mengakses pengembangan keterampilan dan pekerjaan, termasuk alat bantu dan akses ke layanan pekerjaan. Penyediaan layanan ini oleh pemerintah dan non-pemerintah memiliki jangkauan yang rendah, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan mereka berada di bawah ancaman pengurangan selama resesi ekonomi. Layanan dan intervensi ini yang membangun kapasitas tentang inklusi disabilitas di dunia kerja perlu dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.

Mengambil pendekatan inter-seksi untuk inklusi disabilitas. Sementara perempuan mewakili lebih dari

separuh orang dengan disabilitas, pendekatan gender dan disabilitas cenderung berjalan di jalur yang paralel. Akan tetapi, intervensi gender dan disabilitas memiliki banyak kesamaan, seperti pendekatan pengarusutamaan, dan akan berdampak lebih besar jika sifatnya yang saling menguatkan dimanfaatkan dengan lebih baik dalam intervensi.³⁷

Demikian pula, kebutuhan dan pendekatan bersama yang ada dalam tanggapan untuk lansia. Intervensi yang difokuskan pada kelompok-kelompok tertentu, seperti orang yang hidup dengan HIV, masyarakat hukum adat dan suku dan pekerja migran harus inklusif terhadap penyandang disabilitas dan sebaliknya.

Respons terhadap krisis COVID-19 menciptakan **pondasi untuk pemulihan**. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat hak-hak para penyandang disabilitas dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi, melanjutkan pencapaian-pencapaian di bidang-bidang yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Masa depan yang lebih inklusif dimungkinkan untuk semua.

► Rekomendasi secara singkat

Selama karantina dan tindakan pembatasan lainnya:

- a. Memastikan perlindungan dari COVID-19 melalui tindakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) inklusif-disabilitas.
- b. Memastikan kondisi kerja yang dapat diakses dan inklusif dalam semua penataan kerja yang relevan.
- c. Memastikan perlindungan sosial untuk memberikan bantuan segera kepada para penyandang disabilitas melalui bantuan langsung tunai, non-tunai dan mekanisme penyampaian yang disesuaikan.
- d. Memelihara dan mengembangkan layanan dukungan bagi para penyandang disabilitas selama karantina dan krisis kesehatan.
- e. Mengembangkan skema dukungan sebaya terkait pekerjaan yang menargetkan para penyandang disabilitas.

Dalam respons sosial ekonomi:

- f. Memastikan konsultasi dan partisipasi yang berarti dari para penyandang disabilitas di semua tahapan respons sosial ekonomi.
- g. Memastikan penilaian cepat atas situasi ini termasuk terkait penyandang disabilitas, baik perempuan maupun laki-laki, dan menetapkan dasar untuk akuntabilitas dan pelaporan.

- h. Memastikan kombinasi dari pengarusutamaan dan langkah-langkah penargetan untuk keterlibatan penyandang disabilitas dalam semua inisiatif respons sosial-ekonomi.
- i. Membuat mekanisme keuangan dan alokasi sumber daya untuk respons, termasuk para penyandang disabilitas.
- j. Memastikan bahwa program dan inisiatif untuk promosi pekerjaan mencakup penyandang disabilitas dan responsif gender.

Dalam pemulihan:

- k. Memastikan bahwa upaya untuk transisi yang adil bagi kelestarian lingkungan juga inklusif disabilitas.
- l. Memastikan bentuk-bentuk pekerjaan baru dapat diakses dan inklusif bagi para penyandang disabilitas.
- m. Memperluas cakupan dan kecukupan perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas, berkontribusi pada perlindungan sosial universal.
- n. Memastikan perlindungan sosial memfasilitasi pemberdayaan ekonomi para penyandang disabilitas di dunia kerja yang terus berubah.
- o. Mengembangkan atau membangun layanan dukungan disabilitas yang memungkinkan adanya pelatihan dan pekerjaan. Kerangka kerja dan standar ketenagakerjaan internasional yang relevan.

³⁶ Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang telah merancang manfaat disabilitas agar kompatibel dengan pekerjaan. Langkah-langkah untuk melakukannya telah diambil oleh Fiji, Mauritius dan Thailand.

³⁷ Lihat misalnya: Komite Spanyol untuk perwakilan penyandang disabilitas - CERMI (2012) Panduan pengarusutamaan gender dalam kebijakan disabilitas publik

► Kerangka kerja dan standar ketenagakerjaan internasional yang relevan

Komunitas internasional menjamin dimasukkannya penyandang disabilitas melalui kerangka kerja hak dan pembangunan. Komitmen ini perlu diterjemahkan ke dalam inklusi yang bermakna dalam menanggapi krisis global ini.

- *Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan 2030* berjanji untuk tidak meninggalkan siapa pun, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara eksplisit memasukkan penyandang disabilitas dalam target yang ditentukan.³⁸
- *Konvensi PBB untuk Hak Orang dengan Disabilitas* memastikan hak-hak para penyandang disabilitas dalam semua konteks dan bidang kehidupan, termasuk krisis dan keadaan darurat kemanusiaan.³⁹
- *Deklarasi Satu Abad ILO untuk Pekerjaan Masa Depan, 2019*, menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk pendekatan yang berpusat pada manusia guna membentuk pekerjaan masa depan yang adil, inklusif dan aman dengan pekerjaan penuh, produktif dan yang dipilih secara bebas dan pekerjaan yang layak untuk semua. Deklarasi ini menyoroti secara khusus kebutuhan untuk memastikan kesempatan dan perlakuan yang sama di dunia kerja bagi para penyandang disabilitas.⁴⁰
- *Konvensi ILO untuk Rehabilitasi Vokasi dan Pekerjaan (Penyandang disabilitas), 1983 (No. 159)*⁴¹ dan *Rekomendasi Rehabilitasi Vokasi dan Pekerjaan (Penyandang disabilitas), 1983 (No. 168)*⁴² mempromosikan pengembangan keterampilan dan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Konvensi ini mewajibkan Negara-negara anggota untuk merumuskan, melaksanakan dan secara berkala meninjau kebijakan nasionalnya mengenai rehabilitasi vokasi dan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan. Hal ini juga memberikan peran kunci bagi organisasi pekerja dan pengusaha.
- *Rekomendasi Landasan Perlindungan Dasar Sosial ILO, 2012 (No. 202)*⁴³ menetapkan bahwa tunjangan disabilitas harus menjadi bagian dari perlindungan sosial yang diperluas secara progresif dan bahwa perawatan kesehatan esensial mencakup perawatan khusus yang diperlukan untuk disabilitas.
- *Rekomendasi Pekerjaan dan Pekerjaan yang Layak ILO untuk Kedamaian dan Ketahanan, 2017 (No. 205)*⁴⁴ menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam situasi krisis dan konflik.

38 PBB (2015) *Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030*

39 PBB (2008) *Konvensi Hak-Hak Penyandang disabilitas*

40 ILO (2019) *Deklarasi Se-Abad ILO untuk Pekerjaan Masa Depan*

41 *Konvensi ILO tentang Rehabilitasi Vokasi dan Ketenagakerjaan (Penyandang disabilitas), 1983 (No. 159)*

42 *Rekomendasi Rehabilitasi Vokasi dan Pekerjaan ILO (Penyandang disabilitas), 1983 (No. 168)*

43 *Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial ILO, 2012 (No. 202)*

44 *Rekomendasi ILO untuk Pekerjaan dan Kerja Layak bagi Perdamaian dan Ketahanan, 2017 (No. 205)*

► Informasi kontak:

International Labour Organization
4, Route des Morillons
CH-1211 Geneva 22 – Switzerland

T: +41 22 799 6754
E: inwork@ilo.org
www.ilo.org/informaleconomy